

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Pada Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau 2015-2020

Eliadinaty Tambunan¹, Indarti², Inova Fitri³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Lancang Kuning

*e-mail: eliadinatytn@gmail.com

Abstract

This research was conducted against the background of the author's observations that Motor Vehicle Tax and Motor Vehicle Transfer Fees are one source of revenue for Riau Province Regional Original Revenue. This study aims to determine the value of the effectiveness and contribution of Motor Vehicle Tax and Motor Vehicle Transfer Fees from the period 2015 – 2020. The method used in this research is a quantitative method, using indicators of regional financial ratios. The results of this study indicate the value of effectiveness and the value of the contribution given by the Motor Vehicle Tax and the Transfer Fee for Motor Vehicles.

Keywords: tax, effectiveness, contribution

Abstrak

Penelitian yang dilakukan ini, dilatar belakangi oleh hasil pengamatan penulis bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai efektivitas dan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari kurun waktu Tahun 2015 – 2020. Metode yang digunakan dari penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan menggunakan indikator rasio keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai Efektivitas dan nilai kontribusi yang diberikan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Kata kunci: Pajak, Efektivitas, Kontribusi

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berbentuk negara kesatuan yang dibagi atas beberapa daerah provinsi yang terdiri dari daerah kota/kabupaten. Pemerintah pusat memiliki otoritas tertinggi dan wilayah administratif dibawahnya menjalankan kekuasaan didelegasikan oleh pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan pemerintahannya Indonesia menganut sistem otonomi daerah. Istilah otonomi berasal dari bahasa latin yaitu "autos" yang berarti sendiri, dan "nomos" yang berarti aturan. Sehingga otonomi diartikan sebagai mengatur atau memerintah sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sedangkan pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. penerimaan yang memberikan kontribusi cukup besar dalam peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Riau adalah jenis pungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha

Tabel 1 Target PKB & Realisasi PKB Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2015-2020

Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2015	785.271.103.171	802.073.723.877	102.14
2016	848.060.682.239	847.541.057.849	99.94
2017	922.110.774.084	924.518.033.474	100.26
2018	995.110.774.084	1.049.350.992.438	105.45
2019	1.062.771.147.543	1.129.336.200.214	106.26
2020	1.020.766.765.232	1.109.838.807.024	108.73

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2015-2020

Tabel 2 Target BBN-KB & Realisasi BBN-KB Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2015-2020

Tahun	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2015	801.186.526.993	705.571.355.856	88.07
2016	764.126.035.856	602.973.471.812	78.91
2017	828.905.290.108	752.982.892.133	90.84
2018	828.905.290.108	883.868.622.399	106.63
2019	855.430.259.391	802.194.810.924	93.78
2020	744.281.828.040	558.925.504.891	75.10

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2015-2020

Dari uraian data diatas menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) berubah ubah. Pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) rata-rata tiap tahunnya terpenuhi namun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) penerimaan yang memenuhi target hanya tahun 2018 saja yang artinya tahun 2015, 2016, 2017, 2019 dan 2020 penerimaan masih jauh dibawah target yang ditentukan. Dengan kendaaran yang sangat besar jumlahnya di Provinsi Riau maka diharapkan sangat berpengaruh pada penerimaan PKB dan BBNK-KB sebagai sumber penerimaan pada provinsi. Tetapi kenyataannya hasil belum optimal. Berdasarkan fenomena ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan judul : Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) pada Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau 2015-2020

2. METODE PENELITIAN

Yang menjadi objek penelitian ini adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Penelitian ini dilakukan di salah satu Instansi Pemerintah Daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Populasi dalam penelitian ini adalah target dan realisasi Provinsi Riau tahun 2015-2020. Sampel dalam penelitian ini adalah nilai target pajak kendaraan bermotor, target pajak bea balik nama kendaraan bermotor, nilai realisasi pajak kendaraan bermotor, nilai realisasi pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan nilai realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdapat di Provinsi Riau.

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif dengan data sekunder yang telah diolah dan telah menjadi dokumentasi yaitu berupa data Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau pada Pajak Kendaran Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) mulai dari tahun 2015 s.d 2020 di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau juga dengan mengumpulkan sumber-sumber dari buku-buku, jurnal, dan

penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk memperoleh data, maka peneliti mengadakan penelitian ke Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dengan melakukan Observasi yaitu pengamatan secara langsung serta melakukan pencatatan secara sistematis mengenai hal-hal dan semua kejadian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Definisi dan Pengukuran Variabel Operasional

1. Analisis Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif, jadi untuk menganalisis efektifitas dari pajak atas kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor maka peneliti menggunakan rumus.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Tabel 3 Rasio Efektivitas

Tingkat Pencapaian (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
89-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber : Teguh Erawati, 2016

2. Analisis Kontribusi

Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Untuk mengetahui kontribusi pajak atas kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah, digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2 Kriteria Kontribusi

Persentase Kontribusi (%)	Kriteria
0% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber : Teguh Erawati, 2016

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil pengolahan data-data sebagai berikut:

Tabel 4 Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2015-2020

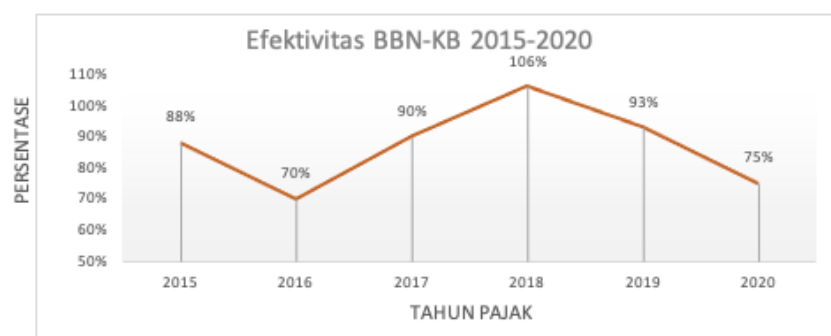
Tahun	Persentase Efektivitas	Kriteria Efektivitas
2015	102%	Sangat Efektif
2016	99%	Efektif
2017	100%	Efektif
2018	105%	Sangat efektif
2019	106%	Sangat efektif
2020	108%	Sangat Efektif
<i>Rata-Rata</i>	<i>103.34</i>	



sumber: data olahan, 2022

Tabel 5 Efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Tahun 2015-2020

Tahun	Persentase Efektivitas	Kriteria Efektivitas
2015	88%	Cukup Efektif
2016	78%	Kurang Efektif
2017	90%	Efektif
2018	106%	Sangat Efektif
2019	93%	Efektif
2020	75%	Kurang Efektif
<i>Rata-Rata</i>	<i>88,34%</i>	

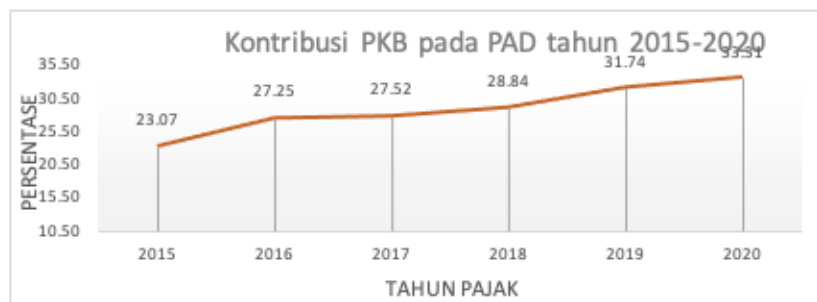


Sumber: data olahan, 2022

Tabel 6 Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau Tahun 2015- 2020 (Hasil Tabel Kontribusi)

Tahun Anggaran	Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria Kinerja Keuangan
2015	23.07	Sedang
2016	27.25	Sedang
2017	27.52	Sedang
2018	28.84	Sedang
2019	31.74	Cukup Baik
2020	33.31	Cukup Baik
Rata-Rata	28.62	

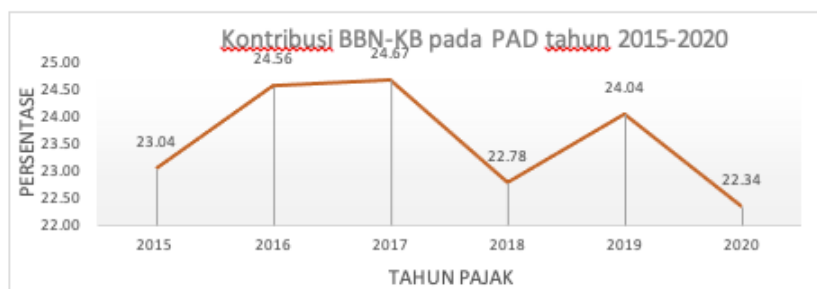
Sumber : data olahan, 2022



Tabel 6 Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD Provinsi Riau Tahun 2015-2020

Tahun Anggaran	Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria Kinerja Keuangan
2015	23.04	Sedang
2016	24.56	Sedang
2017	24.67	Sedang
2018	22.78	Sedang
2019	24.04	Sedang
2020	22.34	Sedang
Rata-Rata	23.57	

Sumber : data olahan, 2022



Realisasi penerimaan berdasarkan rasio efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2015 sampai dengan 2020 mencapai rata-rata 103.34%. Hal ini menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor sangat efektif, karena tingkat efektivitasnya sudah mencapai 100%. Dari tabel dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas selama 6 tahun ini cenderung mengalami kenaikan

dari tahun ke tahun hanya pada tahun 2016 mengalami penurunan. hal ini diakibatkan dari target peraturan pemerintah yang ada cukup sesuai dengan realisasi sebenarnya. Penurunan yang terjadi pada tahun 2016 mungkin disebabkan dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan target penerimaan pajak yang naik dipicu oleh peningkatan jumlah kendaraan bermotor akan tetapi kenaikan realisasi justru meningkat namun tidak sebanding dengan target penerimaannya. Lalu dari tahun 2017 sampai dengan 2020 mengalami kenaikan dengan persentase berturut-turut adalah 100%, 105%, 106% dan 108% yang artinya efektivitas pajak kendaraan bermotor ada dikriteria sangat efektif.

Sementara untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor cukup berfluktuasi dapat dilihat dari grafik 2 menunjukkan efektivitas BBN-KB yang mengalami naik turun dari tahun 2015 sampai dengan 2020 dengan rata-rata sebesar 88,34% yang artinya cukup efektif. tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan dan menjadi nilai persentase terendah yaitu 76% sehingga masuk kedalam kategori kurang efektif. Artinya Pemerintah Provinsi Riau masih harus berbenah lagi dalam mengelola BBNKB agar realisasi penerimaannya bisa mencapai target yang telah ditetapkan dan tingkat efektivitasnya bisa mencapai kriteria sangat efektif.

Penelitian yang sama tentang Efektivitas dan Kontribusi PKB dan BBNKB Provinsi Aceh yang dilakukan oleh Adnan Bensaadi dan Myra Salsabila (2021) juga menunjukkan hasil yang hampir sama. Dengan rata-rata tingkat efektivitas PKB dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar 103,76% masuk dalam kriteria sangat efektif hanya berbeda 0,42% dari Provinsi Riau dengan rata-rata 103,34%. Hal tersebut memperlihatkan bahwasannya Pemerintah Aceh dan Provinsi Riau sudah optimal dalam mengelola PKB pada enam dan lima tahun terakhir.

Maka hal ini harusnya selaras dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, karena dengan optimalnya penerimaan PKB yang berdampak pada Pendapatan Daerah dimana PAD ini secara langsung akan berpengaruh pada apa yang diberikan daerah tersebut kepada masyarakat. Dengan optimalnya penerimaan dan pengelolaannya, maka hak-hak masyarakat seperti pembangunan jalan yang merata di semua daerah dan layanan-layanan yang lain juga akan optimal.

Sementara untuk BBN-KB Provinsi Aceh dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 pada rata-rata tingkat efektivitasnya adalah sebesar 91,84% dengan kategori atau kriteria cukup efektif sama dengan hasil Efektivitas Bea balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Provinsi Riau bedanya Provinsi Riau sedikit lebih dibawah Provinsi Aceh yaitu sebesar 88,34% dengan kriteria atau kategori cukup efektif. Sehingga Pemerintah Aceh dan Provinsi Riau masih harus berbenah lagi dalam mengelola BBNKB agar realisasi penerimaannya bisa mencapai target yang telah ditetapkan dan tingkat efektivitasnya bisa mencapai kriteria sangat efektif.

Rasio kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Asli Daerah di provinsi Riau dari tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan Hanya pada tahun 2020 mengalami penurunan, dengan rata-rata sebesar 28,62% dan ada di kriteria sedang. Sementara untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari tahun 2015 sampai dengan 2020 mengalami naik turun atau berfluktuasi namun berada pada kriteria yang sama setiap tahunnya yaitu kriteria sedang.

Penelitian yang sama yang dilakukan oleh Adnan Bensaadi dan Myra Salsabila (2021) pada Provinsi Aceh justru menunjukkan hal yang berbeda, kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor pada Provinsi Aceh justru ada pada rata-rata sebesar 16,26% dan termasuk ke dalam kategori kurang, memiliki perbedaan dari hasil analisis yang dilakukan di Provinsi Riau dengan rata-rata sebesar 28,62% yang masuk ke dalam kategori sedang. Kurangnya kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor pada Provinsi Aceh dan kriteria sedang yang dihasilkan oleh Provinsi Riau harusnya menjadi acuan bagi kedua pemerintah tersebut untuk berbenah lagi dalam mengelola PKB agar penerimaannya bisa lebih meningkat kedepannya sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap PAD Provinsi Riau dan Aceh.

Sementara untuk BBN-KB Provinsi Aceh dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 pada rata-rata tingkat kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) ada pada rata-rata sebesar

15,28% dan tergolong ke dalam kriteria kurang. Agak berbeda dengan Provinsi Riau dengan rata-rata sebesar 23,57% dalam kategori atau kriteria sedang. Kurangnya kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Provinsi Aceh dan kriteria sedang yang dihasilkan oleh Provinsi Riau harusnya menjadi acuan bagi kedua pemerintah tersebut untuk berbenah lagi dalam mengelola BBN-KB agar penerimaannya bisa lebih meningkat kedepannya sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap PAD Provinsi Riau dan Aceh

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil telaah dan analisis yang dilakukan, tingkat efektivitas pajak Kendaraan Bermotor sudah sangat baik dengan masuk kategori atau kriteria sangat efektif sementara untuk Bea Balik Nama Kendaraan berada pada tingkat atau kategori cukup efektif. Hal ini berarti setiap hal yang sudah dilakukan oleh Bapenda harus dipertahankan namun perlu juga dilakukan peningkatan dengan cara meningkatkan kesadaran dalam diri masyarakat dalam membayar pajak serta mencari potensi pajak guna menambah pendapatan negara. Untuk kontribusi yang diberikan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Kedua Pajak ini berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau. Dari hasil pengujian yang dilakukan nilai kontribusi yang diberikan keduanya berada dalam kategori sedang. Namun perlu adanya peningkatan dan pengelolaan PKB dan BBN-KB supaya ditahun berikutnya PKB dan BBN-KB memberikan kontribusi yang lebih besar atau sangat baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri, Zulfanetti, Heriberta, 2021, Evaluasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) serta dampaknya terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jambi, *Jurnal Paradigma Ekonomika* Vol.16 No.1, hal.151- 166
- B. Boediono, 2000, *Perpajakan Indonesia*, Diadit Media, Jakarta
- Bensaadi, Myra, 2021, Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh Periode 2015-2019, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol. 6 No. 2, Hal 142-149
- Erawati, Teguh. 2016. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul, *Jurnal Akuntansi*, Vol.4 No. 1
- Eryandi, Lizar Alfansi, Benardin, 2011, Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Bengkulu, *Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan*, vol.4 no.2, hal.37-44
- Graha Armanda Sativa, 2018, Optimalisasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama, vol.16, no.2, hal: 115-120
- Ilyas, W., Burton, R, 2011, *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Irani, dkk, 2021, Analisis Efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, *Wahana Inovasi*, vol.10 No.1, hal.172-178
- Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 690.900.372 tahun 1994 tentang Kriteria Penilaian Kinerja dan Keuangan Daerah
- Kesek Feisly, 2013, Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado, vol. 1, no. 4 hal: 1922-1933
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Keuangan Daerah*, Erlangga, Jakarta
- Mardiasmo, 2013, *Perpajakan*, Penerbit Andi, Yogyakarta

- Mokoginta, 2015, Analisis Efektivitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Utara, Jurnal EMBA, Vol.3 No.1, hal. 685-694
- Mourin M. Mosal. 2013. Analisis Efektivitas Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penetapan Akuntansi di Kota Manado. Jurnal EMBA, Vol. 1 No.4, hal 374-382
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah Resmi Siti, 2019, Perpajakan Teori dan Kasus, Salemba Empat, Jakarta
- Shofiatul Mila, Yunita, Feri, 2021, Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang, vol.8 no.1, hal: 29-43
- Siahaan, Marihot, P., 2010, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Republik Pers, Yogyakarta Siregar, maju, 2020, Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Dan Roda Empat Terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Upt Samsat Medan Selatan, vol.4 no.2, hal. 54-68